

# **PEMANFAATAN KELEMBAGAAN PONDOK PESAN- TREN BAGI PENYULUHAN PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN AGRIBISNIS**

Oleh :

**Ir. Agus Purbathin Hadi, M.Si**

## **Pendahuluan**

Memperhatikan keadaan dan perubahan pembangunan pertanian dan perdesaan dewasa ini beserta tantangan-tantangan yang ada, sangat perlu dipersiapkan strategi pendidikan masyarakat perdesaan yang efektif dalam menunjang pembangunan. Hal ini mengingat kegiatan pendidikan melalui penyelenggaraan penyuluhan pembangunan, terutama penyuluhan pertanian, belum dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat sasaran. Beberapa hasil penelitian melaporkan bahwa keadaan penyuluhan pertanian di Indonesia sampai pertengahan tahun 1990-an kurang memberi dukungan kepada kebutuhan petani-nelayan, penerapan prinsip-prinsip agribisnis, sumberdaya, keterpaduan antar lembaga, otonomi daerah dan peranserta masyarakat.

Kesimpulan Tim Pengkajian Jibatani setelah melakukan penelitian di delapan propinsi menunjukkan bahwa kinerja rata-rata penyuluh pertanian sangat rendah (Harun, 1996). Kesimpulan ini didukung oleh hasil penelitian Osemasan (1994) yang menemukan bahwa tingkat pelaksanaan tugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kabupaten Lombok Barat belum maksimal, antara lain karena adanya kendala jumlah petani binaan yang terlalu banyak, medan yang sulit dijangkau, kurangnya uang bimbingan, dan banyaknya tugas-tugas tambahan PPL. Dua studi berikutnya, yaitu oleh Hasta Cakra dan Tim Studi Bank Dunia menyimpulkan terjadi penurunan kualitas pengelolaan, penyelenggaraan, serta monitoring dan evaluasi penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian dinilai telah mengalami degradasi dan seolah lumpuh, tidak efektif dan tidak fleksibel (Harun, 1996).

Pendekatan penyuluhan pembangunan yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah pendekatan kelompok, karena kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi wahana belajar dan kemajuan yang bergerak secara mandiri. Akan tetapi, pembentukan kelompok-kelompok tersebut pada umumnya dibentuk dari atas (*top down*) dan hanya dimanfaatkan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan pemerintah. Hasil penelitian Bank Dunia yang dikutip Harun (1996) menemukan bahwa banyak kelompok tani yang tidak berfungsi, tidak efektif dalam berorganisasi, dan tidak mandiri. Hal tersebut antara lain disebabkan karena kebanyakan kelompok tani dibentuk berdasarkan keproyekan atau berdasarkan keperluan pelaksanaan program-program pemerintah.

Secara sektoral, hampir semua instansi pemerintah memanfaatkan eksistensi kelompok sebagai media informasi pembangunan dan menggerakkan masyarakat. Di sektor pertanian memanfaatkan Kelompok Tani, sektor pendidikan menggunakan Kelompok Belajar (Kejar) Paket, sektor penerangan menggunakan Kelompok Pencapir, sektor KB menggunakan Kelompok Akseptor, dan untuk meningkatkan peranan perempuan dikenal kelompok PKK. Pada era Orde Baru juga dilakukan mobilisasi

masyarakat dengan memibentuk berbagai kelompok “sadar”, seperti Kelompok Sadar Hukum, Kelompok Sadar Wisata, Kelompok Sadar Pajak, dan sebagainya. Dengan alasan percepatan pembangunan, kelompok-kelompok tradisional yang sebelumnya eksis diformalkan bentuk dan strukturnya seperti kasus perubahan kelompok pengairan tradisional *Subak* di Bali dan Lombok yang diubah menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Terjadilah proses defungsionalisasi kelembagaan masyarakat sehingga hampir tidak ada lagi lembaga masyarakat (tradisional) yang berdaya menghadapi arus penyeragaman yang dimobilisasi sedemikian rupa.

Pada masa tersebut, kegiatan penyuluhan hanya merupakan pelengkap dari suatu program pembangunan, bukan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Misalnya program penyuluhan pertanian hanya menjadi pelengkap program pembangunan pertanian dengan berbagai target dan sasaran yang dibebankan kepada PPL. Menurut Slamet (1995) sebenarnya kegiatan penyuluhan pertanian dapat berdiri dan berjalan sendiri tanpa harus ada program pertanian pemerintah, sebab program pertaniannya adalah milik dan dijalankan oleh petani sendiri. Paradigma lama penyuluhan pembangunan tersebut tidak memberikan dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pembangunan, terlebih kepada kaum perempuan yang seringkali termarjinalkan.

Kelahiran UU Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih dikenal dengan UU Otonomi memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kesempatan yang diberikan oleh UU No. 22 tersebut hendaknya dapat menjadikan lembaga-lembaga yang selama ini ‘mati suri’ dapat kembali berperan, menemukan jati dirinya yang selama ini hilang. Tanpa harus membentuk kelompok baru (termasuk menunjuk pemimpin baru dan mencari anggota baru), di masyarakat sudah cukup banyak kelompok-kelompok yang eksis dan dapat dimanfaatkan serta berkemampuan mempengaruhi banyak orang, seperti fora pengajian, fora arisan, fora gotong-royong, fora adat, dan sebagainya. Salah satu lembaga yang sangat potensial adalah Pondok Pesantren.

## **Kelembagaan Lokal Sebagai Sasaran Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan Masyarakat.**

Berbagai penelitian yang dilakukan Hadi (1991; 1995; 1997), Muktasam (1998), Suadnya (1998) dan Hilyana dan Hadi (1998) tentang kelembagaan petani di Pulau Lombok menyimpulkan hal yang sama, bahwa kelompok-kelompok petani yang ada belum mampu untuk menjadi kelompok yang eksis dan mandiri. Kebijakan pendekatan hamparan dalam pembinaan kelompok tani yang dilakukan selama ini tidak efektif. Hadi (1995; 1997) menemukan bahwa banyak petani yang tercatat sebagai anggota dan bahkan pengurus kelompok tani yang tidak mengetahui kalau dirinya adalah anggota dan atau pengurus kelompok tani. Hal ini disebabkan karena petani yang lahan sawahnya berada pada suatu hamparan otomatis didaftarkan sebagai anggota kelompok tani oleh PPL.

Studi kasus yang dilakukan Muktasam (1998) di dua desa di Kabupaten Lombok Barat menemukan bahwa hanya satu kelompok tani yang aktif dari 16 kelompok tani yang tercatat di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Kelompok tani dengan 30 anggota aktif ini berperan tidak saja dalam transfer teknologi, tetapi juga

cukup berperan dalam pelayanan sarana produksi dan kebutuhan pokok, bahkan mampu menghimpun dana kelompok.

Seperti diungkapkan di depan, permasalahannya adalah kelompok-kelompok petani dan masyarakat pedesaan selama ini hanya dijadikan obyek program-program pembangunan *top down* oleh aparat pemerintah. Secara lebih terperinci, Muktasam dan Chamala (1998) mengemukakan bahwa masalah penting dalam upaya pemanfaatan kelompok bagi kepentingan pembangunan adalah antara lain (1) pendekatan yang paralel dan kurang terkoordinasi, (2) bersifat *top down* dan kurang partisipatif, (3) pendekatan dengan pemberian insentif, dan (4) upaya-upaya pencapaian target tanpa memperhatikan kondisi obyektif.

Kasus yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan refleksi terhadap dominannya campur tangan aparat pelaksana pembangunan adalah perubahan kelembagaan non formal tradisional yang lebih dulu eksis menjadi kelompok-kelompok formal yang dikendalikan agen-agen pembangunan. Contoh kasus yang menarik adalah perubahan bentuk kelembagaan petani pemakai air, seperti *Subak* di Bali dan Lombok, *Malar* dan *Punggawa* di Pulau Sumbawa, atau *Mitra Cai* di Jawa Barat menjadi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Aturan-aturan adat dalam kelembagaan tradisional, seperti *awiq-awiq* pada *Subak* diubah menjadi AD dan ART pada P3A, padahal *awiq-awiq* tersebut sarat dengan kearifan lokal (*local indigenous*) yang sangat ditaati para anggota *Subak*.

Studi Muktasam dan Chamala (1998) menunjukkan bahwa P3A begitu berat untuk berjalan menuju kelompok yang matang dan mandiri. Beberapa permasalahan penting yang teridentifikasi antara lain (1) jumlah anggota yang tidak jelas dan tidak dinamis seiring dengan dinamika pola penguasaan lahan serta mobilitas usahatani, (2) dualisme kelembagaan, antara P3A sebagai suatu kelembagaan formal baru dengan kelembagaan tradisional *Subak*, yang pada beberapa kasus memunculkan kecemburuan sosial khususnya di tingkat pengurus, (3) proses pengesahan AD/ART P3A yang berlarut-larut (oleh Bupati dan didaftarkan di Pengadilan Negeri), berimplikasi pada terbatasnya proses sosialisasi dan implementasi AD/ART, bahkan ironinya sampai pergantian pengurus belum sempat melaksanakan AD/ART.

Kembali pada kearifan kelembagaan lokal, adanya aturan-aturan adat yang dipatuhi semua anggota kelompok membuat kelompok tersebut tumbuh menjadi kelompok yang kohesif. Dari segi kepemimpinan kelompok, kelompok-kelompok tradisional pada umumnya dipimpin oleh tokoh kharismatis yang ditaati anggota kelompok. Peran kepemimpinan kelompok ini seringkali kurang mendapat perhatian agen pembangunan, banyak kasus pemimpin dalam kelompok-kelompok formal hanya keberadaannya hanya atas penunjukan penyuluh.

Hasil penelitian Hadi (1991; 1995; 1997) menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi dari kontak tani ke anggota kelompok akan dapat berjalan apabila kontak tani tersebut adalah pemimpin aspiratif yang dipilih oleh anggotanya. Hasil tersebut didukung oleh Hilyana dan Hadi (1998) yang menemukan bahwa meskipun kelompok dibentuk dengan pola *top down*, akan tetapi apabila pemimpin kelompok tersebut berasal dari tokoh adat/ agama yang disegani, dan aturan-aturan setempat yang berlaku disepakati sebagai aturan kelompok, maka keberadaan kelompok tersebut akan dapat berjalan dengan baik.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok berbasis kelompok lokal ini akan lebih efektif karena kelompok lokal umumnya memiliki aturan adat (*awig-awig*) yang sangat ditaati anggotanya karena adanya sanksi moral terhadap setiap pelanggaran aturan kelompok. Di kalangan masyarakat Sasak di Pulau Lombok misalnya, dikenal paguyuban yang disebut

*Krama Banjar*, yaitu perkumpulan anggota masyarakat yang keanggotaannya berdasarkan dan mempunyai tujuan yang sama, misalnya *Krama Banjar Subak* (perkumpulan petani pemakai air), *Banjar Merararik* (perkumpulan pemuda yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan pernikahan), *Banjar Mate* (perkumpulan anggota masyarakat yang mengumpulkan dana model arisan untuk keperluan bila terjadi musibah kematian), dan lain-lain (Arzaki, 2001).

Dari uraian di atas, sudah saatnya disadari bahwa kelompok jangan hanya sekedar menjadi instrumen untuk implementasi kebijakan, tetapi merupakan wadah pemberdayaan masyarakat perdesaan. Konsep pemberdayaan menurut Ife (1995) adalah sebagai suatu proses untuk meningkatkan kekuatan pihak-pihak yang kurang beruntung, hanya dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang mampu melibatkan mereka dalam proses pengembangan kebijakan, perencanaan, aksi sosial politik, dan proses pendidikan. Esensi proses pemberdayaan tersebut menjadi argumentasi bahwa upaya revitalisasi peran kelompok hanya dapat dilakukan melalui proses-proses yang partisipatif, dari tahap pembentukan, perencanaan, aksi, pengawasan atau evaluasi, hingga pada berbagi terhadap hasil yang diperoleh kelompok.

## **Pondok Pesantren Sebagai Sasaran Penyuluhan dan Pusat Pengembangan Agribisnis**

Pondok Pesantren merupakan salah satu lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat. Pondok Pesantren adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang sudah sejak lama membina hubungan yang baik dan akrab dengan masyarakat disekitar mereka. Pondok Pesantren, didukung dengan baik sekali melalui pemberian bantuan berupa sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, dan sangat dihormati dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap masyarakat disekitar mereka. Namun demikian, sumberdaya-sumberdaya milik pesantren itu hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal, dalam hal memberikan dukungan terhadap pengembangan masyarakat disekitar mereka.

Salah satu potensi sumberdaya yang dimiliki oleh Pondok Pesantren adalah potensi santri, jamaah dan masyarakat sekitar pondok yang umumnya bermatapencaharian sebagai petani. Potensi sumberdaya lainnya adalah potensi sumberdaya alam berupa lahan dan usahatani di sekitar pesantren. Untuk itu sangat tepat apabila Pondok Pesantren melakukan kegiatan pengembangan agribisnis. Dalam melaksanakan kegiatan agribisnis pondok pesantren dapat melakukan pengelolaan usahatani tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, perikanan dan peternakan, Pondok Pesantren mengikutsertakan beberapa siswanya yang dianggap mampu untuk ikut mengelola kegiatan agribisnis. Manfaatnya bagi para siswa, selain mendapatkan ilmu yang berharga mengenai usaha pertanian untuk bekal masa depannya juga para siswa tersebut dibebaskan dari biaya pendidikan bahkan menerima uang saku.

### ***Kasus Pondok Pesantren Al-Ittifaq***

Salah satu contoh kasus pengembangan agribisnis melalui pondok pesantren adalah seperti yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Ittifaq, di Kampung Ciburial, Desa Alamendah, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pondok ini didirikan

pada tanggal 1 Pebruari 1934 oleh KH. Mansyur, pada masa itu sampai tahun 1960-an masih sangat tradisional dan belum di usahakan pada bidang pertanian. Awal perkembangan dialami mulai tahun 1970-an setelah kepemimpinan pondok pesantren Al-ittifaq diserahkan pada KH.Fuad Affandi yang merupakan cucu dari KH. Mansyur.

Pada perkembangan selanjutnya PP Al-Ittifaq merasa perlu dan terpanggil untuk berusaha dan mengusahakan diri pada bidang pertanian, hal ini di sebabkan lokasi dan lingkungan yang ada sangat cocok untuk dibidang tersebut. Kondisi saat itu juga merupakan salah satu penyebab karena didesak oleh kebutuhan untuk menghidupi dan memberi makan sejumlah anak didik / santri yang belajar dan mondok di pesantren. Hal ini terjadi karena para santri yang ada di PP Al-Ittifaq, terdiri anank yatim ataupun dari keluarga yang tidak mampu.

Pada saat ini Yayasan Al-Ittifaq mempunyai 7 (tujuh) bidang kegiatan yang masing-masing kegiatan tersebut ada yang bersifat mandiri dalam arti khusus digarap oleh satu bidang, dan ada juga kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Tujuh bidang tersebut antara lain: (1) Bidang pendidikan kepesantrenan, (2) Bidang Agribisnis dan Koppotren, (3) Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan, (4) Bidang Humas dan Dakwah, (5) Bidang Kesejahteraan Sosial, (6) Bidang Peranan Wanita, dan (7) Bidang Seni dan Budaya

Pondok Pesantren Al-Ittifaq mempunyai visi: "Memberdayakan umat melalui Ilmu Agama dan usaha yang berwawasan Agribisnis." Misi yang diembankan oleh PP Al-Ittifaq: "Meningkatkan Ketaqwaan dan taraf hidup masyarakat pondok pesantren maupun masyarakat sekitarnya agar hidup mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidupnya."

Strategi yang digunakan pondok pesantren Al-Ittifaq dalam pengelolaan agribisnis, antara lain:

- 1) **Pemilihan Komoditi.** Komoditi yang ditanam di lahan pertanian pondok pesantren dan sekitarnya adalah komoditi yang diminta pasar, baik pasar tradisional maupun pasar Swalayan. Dalam proses pelaksanaan pengolahan pertanian, dilaksanakan secara terpadu, hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat prioritas kebutuhan pasar.
- 2) **Perencanaan.** Dalam upaya memenuhi permintaan pasar sesuai dengan kontrak kerjasama/kemitraan antara pondok pesantren baik melalui KUD atau langsung dengan pengusaha, telah dilakukan koordinasi dengan kelompok tani lainnya yang bernaung di dalam wadah koperasi pondok pesantren.
- 3) **Proses Pengelolaan.** Dalam pengelolaan Agribisnis tersebut, para santri dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan minat dan tingkat pendidikan dan keterampilan khusus yang di miliki para santri. Secara umum pembagian tugas para santri dan Ustad tersebut adalah : (1) Pengurus Inti Organisasi Agribisnis, (2) Kesekretariatan, (3) Mandor Kebun, (4) Pengemasan, (5) Pemasaran, (6) Pekerjaan lapangan, dan (7) Pengadaan Barang.
- 4) **Kontrak Kerjasama dan Pemasaran.** Kontrak kerjasama/kemitraan merupakan bagian yang terpenting sehingga hasil pertanian dapat langsung dipasarkan tanpa kekhawatiran tidak terjual.

Selain membentuk Koperasi Pondok Pesantren dan bermitra dengan pengusaha swasta, sekitar awal tahun 1990 pondok pesantren atas peran serta KUD Pasir Jambu mengadakan jalinan kemitraan dengan Hero Supermarket dalam memasarkan hasil pertaniannya.

Pada awal kerjasama ini banyak menemukan dan menghadapi berbagai kendala, namun berkat bantuan teknis dan lapangan dari KUD Pasir Jambu dan Hero Supermarket setahap demi setahap kendala tersebut dapat di tanggulangi. Sampai saat ini mitra usaha terus bertambah dan menguntungkan berbagai pihak. Kiat menjaga hubungan dengan pelanggan adalah dengan senantiasa menjaga : (1) Ketepatan waktu/kontinuitas, (2) Ketepatan ukuran/warna, mutu/kualitas, (3) Ketepatan Volume.

Sayuran yang diusahakan sekitar 26 jenis, antara lain : kentang, tomat, wortel, buncis, kol merah, kol bulat, cabe merah, caisim, terong, daun mint, jeruk lemon, bawang daun, dan kucai. Lahan yang diusahakan Pondok Pesantren Al-Ittifaq seluas 17 Hektar dan MoU dengan Perum Perhutani seluas 400 Ha untuk direboisasi dengan pohon pinus dan suren.

Teknologi yang di gunakan dalam budidaya sayuran di Pondok Pesantren Al-Ittifaq merupakan teknologi ramah lingkungan dengan menggunakan teknik pengendalian Hama Terpadu dan tepat guna. Penggunaan kompos dan penggunaan pestisida Nabati, dengan tujuan menekan seminimal mungkin penggunaan Pestisida Kimia. Teknologi yang di gunakan : Mesin Warpping, Mesin Tongcai, Mesin Saos, Mesin Penggilingan dan lain-lain dengan penggunaan jika diperlukan. Hasil akhir mendapat perlakuan yang sama dengan pemisahan *grade* : (1) Grade I untuk pasar swalayan/supermarket, (2) Grade II pasar umum, (3) Grade III konsumsi santri, dan (4) Grade IV konsumsi ternak.

### ***Pondok Pesantren Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis***

Pondok Pesantren dapat dikembangkan menjadi sebuah pusat informasi dan pendidikan mengenai pengembangan agribisnis, dan sebagai sebuah lembaga keuangan guna melayani masyarakat disekitarnya. Ada tiga elemen dalam mengembangkan lembaga dan mengakar di masyarakat (LM3) pada Pondok Pesantren, yaitu :

- *Pengembangan/penguatan Istitusi.* Agar supaya mempersiapkan pondok pesantren guna memikul peranan ini, khususnya berkenaan dengan pengembangan ekonomi setempat, petunjuk kelembagaan yang sungguh-sungguh dan penguatan akan dibutuhkan. Kedua hal ini akan ada didalam pesantren itu sendiri, dan juga didalam lembaga-lembaga desa yang relevan.
- *Pengembangan Sumberdaya Manusia.* Pengembangan Sumberdaya Manusia diselenggarakan dalam dua tingkatan; pengembangan sumberdaya manusia didalam Pondok Pesantren itu sendiri, dan diantara anggota-anggota masyarakat yang dipilih untuk itu yang berminat dalam hal pengembangan agribisnis. Disamping pengembangan sumberdaya manusia dari Pondok Pesantren itu, yang pada dasarnya berfokus pada guru-guru, pengembangan sumberdaya manusia juga menjadikan masyarakat yang berdiam disekitar lokasi Pondok Pesantren sebagai target sasaran, baik secara formal maupun berupa "on the job" training.
- *Model inkubator guna pengembangan Pusat Agribisnis Masyarakat.* Ungkapan tersebut mengacu pada prinsip pemeliharaan terhadap sebuah inti keahlian guna meningkatkan modal dan memfasilitasi perluasan ketrampilan didalam masyarakat. Model Inkubator dalam Pengembangan Pusat Agribisnis akan digunakan sebagai lapatorium pengalaman bagi Pondok Pesantren dan sebagai pusat pembelajaran bagi masyarakat disekeliling mereka. Bagi

kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, pengembangan sepertinya mengarah kepada yang berorientasi pada kelompok dan diharapkan akan menghasilkan sebuah plasma guna pengembangan kelompok masyarakat agribisnis dimasa yang akan datang, dibawah bimbingan dari pesantren itu.

## PUSTAKA ACUAN

- Arzaki, Djalaludin.,2001. *Kearifan Budaya Suku Bangsa Sasak dalam* Nilai-nilai Agama dan Kearifan Budaya Lokal. Mataram: Redam.
- Hadi, Agus Purbathin., 1991. Studi Proses Adopsi Teknologi Pertanian (Kasus Supra Insus di WKBPP Rumak Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Hadi, Agus Purbathin., 1995. Kepemimpinan Kontak Tani Dalam Proses Difusi Inovasi (Kasus Kelompok Tani Tunggal Kayun WKPP Kuripan Lombok Barat). Laporan Penelitian. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Hadi, Agus Purbathin., 1997. Jaringan Komunikasi Dalam Proses Difusi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu di Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Agroteksos, Volume 7 Nomor 3. Mataram : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdesaan (P3P) Universitas Mataram.
- Harun, Rochajat, 1996. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian (Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian). Makalah pada Apresiasi Manajemen dan Metodologi Penyuluhan bagi Peneliti. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hilyana, S. dan Hadi, A.P., 1998. Persepsi Petani Terhadap Kepemimpinan Kontak Tani Pada Berbagai Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Lombok Barat. Laporan Penelitian. Mataram : Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Ife, J.W., 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Muktasam, A., and Chamala, R.S., 1998. *Group Approach in Indonesian Rural Development: Why It Fails ?*. *Dalam* Learning Communities, Regional Sustainability and the Learning Society. Conference Proceedings. Vol 2. Tasmania Australia.
- Oseman, C.I., 1994. Tingkat Pelaksanaan Tugas dan Kendala yang Dihadapi PPL Dalam Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Lombok Barat. Skripsi. Mataram: Fakultas Pertanian Universitas Mataram.
- Slamet, Margono., 1995. Sumbang Saran Mengenai Pola, Strategi dan Pendekatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada PJP II. Makalah pada Lokakarya Dinamika dan Perspektif Penyuluhan Pertanian pada PJP II. Bogor: PSE, PUSTAKA dan CIIFAD.